



# BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 955/III/IV/2017 • APRIL 2017



## **KOMISI VIII DPR RI PANTAU LANGSUNG PENANGANAN PASCA LONGSOR PONOROGO**

4 Pimpinan DPR RI Desak  
Usut Tuntas Kasus Penyiraman  
Air Keras kepada Penyidik KPK

8 Komisi V DPR RI  
Tinjau Perkembangan  
Proyek MRT

**GRATIS**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

# Komisi VIII DPR RI Pantau Langsung Penanganan Pasca Longsor Ponorogo



Tim kunker spesifik Komisi VIII DPR RI memantau penanganan pasca tanah longsor di Kabupaten Ponorogo

Tim kunker spesifik Komisi VIII DPR RI memantau penanganan pasca tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Senin, (11/4). Tim Kunker dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid meninjau sejumlah titik yaitu dapur umum, posko pengungsi, lahan relokasi tempat tinggal dan lokasi tanah longsor.

**M**engenai dihentikannya pencarian korban sejak sehari sebelumnya (Minggu, 9/4) lalu, Sodik menjelaskan bahwa hal ini sudah sesuai protap yang ada. "Kita ikuti protap bahwa ada batas waktu pencarian boleh dihentikan dan prosedur itu benar apalagi ketika ada bencana susulan. Hanya masalahnya adalah harus mengkomunikasikan dengan baik. Saya tadi sudah cek kepada keluarga korban, mereka katakan sudah mengikhlaskan, artinya proses komunikasinya sudah dilaksanakan oleh para petugas di sini," ujar Sodik.

Hal lain yg mendapat sorotan dari Komisi VIII DPR RI adalah bahwa kelangsungan program dan anggaran yang dirancang DPR RI bersama BNPB. Mulai dari program bantuan darurat, relokasi dan program operasional.

"Kami sudah cek tadi dengan petugas dan korban mereka mengatakan sudah oke tinggal ada sedikit soal MCK. Dan relokasi kami sudah melihat proses pembangunannya. Artinya koordinasi dengan pemda sudah berjalan dengan baik," jelas Sodik. Pemda Ponorogo telah menyediakan lahan untuk relokasi hunian korban dan berangsur telah

dilakukan pembangunan dengan bantuan TNI yang diapresiasi sebagai wujud koordinasi yang bagus dan kesiapsiagaan yang tinggi.

"Kita apresiasi koordinasi dan kesiapsiagaan yang bagus. Tapi masih ada evaluasi besar kita, yaitu daerah ini tidak termasuk zona merah dalam peta bencana nasional tapi tiba-tiba ada. Kemudian mengenai anggaran bahwa kini jumlah bencana ragam dan kualitasnya bertambah sehingga tampaknya anggaran bencana nasional harus kita tingkatkan lagi," papar Sodik menutup peninjauan di depan lokasi tanah longsor. ■

(ray,mp).foto : Rizka/hr.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah saat acara *Press Gathering* di kantor Bupati Wonogiri, Jawa Tengah

## Wonogiri Harus Jadi Pusat Manufaktur Pertanian

Sebagai peraih penghargaan Kalpataru, Kabupaten Wonogiri harus mengubah diri menjadi pusat manufaktur pertanian. Produk-produk pertanian mesti ditingkatkan dan akses pasar juga harus dibuka seluas mungkin. Pemda setempat harus membantu merealisasikannya.

**W**akil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah menyerukan hal tersebut saat memberi sambutan pada acara *Press Gathering* di kantor Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (8/4). Ketika manufaktur pertanian sudah terbangun, Wonogiri harus segera membuka jaringan dengan kota-kota besar untuk menjual produk-produk pertaniannya dengan harga mahal. Fahri juga berharap, Pemda setempat membantu pembiayaan para petani agar tidak terjebak pada alur pembiayaan para rentenir.

"Kalau sektor pertanian sudah dikerjakan, saya kira rakyat kita sejahtera. Rakyat yang sejahtera inilah yang bisa membatasi diri untuk tidak membuat kerusakan lingkungan. Kehidupan kita juga akan terjaga. Posisi Wonogiri sebagai penerima Kalpataru harus dipertahankan," ucap politisi PKS tersebut. Kelak, Wonogiri bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga lingkungan dan memajukan sektor pertanian.

Dalam acara tersebut hadir tokoh pelestari lingkungan Wonogiri, Bapak Sadiman. Walau sudah sepuh, ia sangat peduli menjaga kelestarian hutan, sungai, dan kebersihan alam di Wonogiri. Hadir pula dua Anggota DPR RI dari dapil Wonogiri, Endang Maria Astuti (F-PG) dan Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDI Perjuangan). Wakil Bupati Edi Santoso hadir menerima rombongan DPR RI. Acara ini sendiri bertajuk "Tantangan, Masalah, dan Solusi di Sektor Pertanian".

Usai menggelar pertemuan, Fahri Hamzah didaulat menebar benih ikan nila dan menanam sepuluh bibit pohon tanjung di waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Waduk seluas 8.800 ha ini, mengairi areal sawah seluas 23.600 ha hingga ke Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen. Selain sebagai sumber irigasi, waduk ini juga menjadi destinasi wisata bagi masyarakat setempat dan wisatawan dari berbagai daerah.

"Saya kira karena Wonogiri berkali-kali mendapat Kalpataru, maka layaklah di Wonogiri ini lahir pemikiran-pemikiran yang mengajarkan masyarakat daerah lain, untuk bagaimana menyusun strategi menjaga kehidupan ini untuk anak cucu kita kelak. Kita bantu juga Wonogiri mempromosikan diri menjadi contoh dan menjadi tempat kunjungan wisata bagi masyarakat daerah lain," imbuhnya. ■

(mh) foto: ojiel/hr.

- PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**  
Bagus Mudjiharjanto
- ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,  
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah
- ADMINISTRASI FOTO**  
Hasri Mentari
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: DPR RI.pemberitaan@gmail.com, www.DPR RI.go.id/berita



4 Pimpinan DPR RI Desak Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras kepada Penyidik KPK

8 Komisi V DPR RI Tinjau Perkembangan Proyek MRT

**PENERBITAN**  
Pimpinan Penerbitan  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**Penanggung Jawab Produksi**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**Staf Produksi**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

**Distribusi dan Sirkulasi**  
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

**Koordinator**  
Mujiono

**Staf Distribusi dan Sirkulasi**  
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita, Ifan, Siti Rondiyah, Oji

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

# Pimpinan DPR RI Desak Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras kepada Penyidik KPK

Pimpinan DPR RI mengutuk keras kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Apapun motif di balik peristiwa dan musibah yang terjadi itu, perilaku tersebut jelas tidak beradab dan merupakan tindakan kriminal yang harus diusut tuntas.



Ketua DPR RI Setya Novanto

Ditegaskan lagi, sebagaimana harapan masyarakat, DPR RI mendukung sepenuhnya penyelamatan KPK baik dari segi kelembagaan maupun dari segi personal. Mereka adalah harapan masyarakat di tengah upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan Pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, serangan fisik yang menimpa Penyidik Senior KPK Novel Baswedan bukan hanya ditujukan kepada pribadi Novel maupun Institusi KPK. Serangan tersebut sebenarnya ditujukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saat ini tengah berperang melawan korupsi. ■



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan

(dep.mpr) Foto : Jaka/hr

“ Saya berharap, kejadian ini tidak menyurutkan sedikitpun langkah KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Saya yakin dan percaya, Saudara Novel Baswedan adalah figur yang kuat dan penuh dedikasi. Kejadian ini tidak akan mengendurkan sedikitpun langkah beliau dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tandas Ketua DPR RI Setya Novanto dalam keterangan persnya Selasa (11/4).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan menegaskan, penyerangan ini harus diusut tuntas. Perlindungan terhadap penegak hukum menurutnya diperlukan agar negara tidak terintimidasi terhadap aksi teror. “Jangan sampai ada aksi teror yang kecolongan atau jangan sampai ada aksi intimidasi. Jangan sampai itu terjadi pada aparat hukum,” ujarnya.

Novanto menambahkan, dirinya mengenal penyidik KPK itu sebagai sosok yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. Sebagai penyidik, Novel Baswedan selama ini merupakan salah satu tulang punggung dan figur penting di balik kinerja KPK yang cukup membanggakan publik,” ia menambahkan,

## Dua Anggota BPK Disahkan DPR RI

Dua anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Keduanya adalah Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun yang masing-masing memperoleh 31 suara dan 29 suara.



Pimpinan DPR RI bersama Anggota BPK terpilih



# Delegasi DPR RI Berpartisipasi Aktif dalam Sidang IPU ke-136

Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Umum *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-136 dan pertemuan terkait di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 1 - 5 April 2016. Delegasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon berpartisipasi aktif dalam sidang tersebut. Delegasi tersebut terdiri dari 6 anggota, yakni Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP /F-PD), Capt. Anton Sihombing (F-PG), Evita Nursanty (F-PDIP), Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ferry Kase (F-Hanura) dan Andi Iwan Darmawan Aras (F-Gerindra).

Pada sidang umum ke-136 tersebut, IPU mengadopsi "Dhaka Communique" yang bertema *Redressing Inequalities: Delivering on Dignity and Well-being for All*. Ketua Delegasi Fadli Zon, memberikan pidato dalam debat umum yang bertema ketimpangan. Fadli menekankan pentingnya kesetaraan

dalam akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sebagai salah satu upaya mempersempit ketimpangan. Pemerintah harus mengintervensi dalam hal kepemilikan lahan, sistem perpajakan yang lebih transparan dan kuat, hingga peneguhan upah yang layak dan pemajuan semangat wirausaha.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam laporannya pada Rapat Paripurna, Selasa (11/4), menyampaikan, ada 26 calon yang menjalankan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR RI. Agung Firman Sampurna sendiri merupakan calon incumben yang masa tugasnya berakhir pada 18 Maret 2017. Ia terpilih kembali dalam uji kelayakan yang digelar pada 3 sampai 6 April 2017. Usai uji kelayakan, Komisi XI DPR RI langsung mengambil keputusan dengan mekanisme *voting* tertutup.

"Berdasarkan hasil penghitungan suara terhadap 26 calon, Komisi XI DPR RI menyepakati dua calon anggota BPK RI terpilih yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Agung Firman Sampurna dengan memperoleh 31 suara dan Isma Yatun dengan memperoleh 29 suara," ungkap Hafisz dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna.

Selain nama Agung Firman dan Isma Yatun, ada nama-nama calon lainnya yang menempati urutan ketiga dan keempat dalam pemungutan suara. Keduanya adalah Dadang Suarna (27 suara) dan Abdul Latief (19 suara). Kini, posisi dua kursi anggota BPK yang kosong



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan laporannya pada Rapat Paripurna

segera terisi oleh dua anggota BPK yang sudah disahkan tersebut. Selain Agung Firman, anggota yang juga habis masa jabatannya di BPK adalah Sapto Amal Damandari.

Saat pendaftaran, sambung Hafisz dalam laporannya, ada 28 kandidat yang mendaftar. Namun, satu calon mengundurkan diri dan satu lagi tak mengikuti proses pertimbangan di DPD RI. Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No.15/2006 tentang BPK, anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI. ■

(mh) foto: Azka/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon dalam Sidang IPU ke-136 di Dhaka, Bangladesh

Ketimpangan antardaerah juga perlu ditangani dengan skema fiskal yang tepat. Dalam level global, Indonesia menekankan pentingnya representasi yang lebih adil dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga multilateral sehingga kesenjangan dalam pengambilan keputusan antara negara maju dan negara berkembang lebih menyempit dan hasilnya dapat lebih adil bagi semua.

Sementara itu, Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf yang menjabat sebagai Presiden *Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* (IHL) memimpin sidang Komite IHL pada tanggal 2 April 2017. Sidang komite tersebut membahas beberapa perkembangan isu antara lain isu perlindungan pengungsi, isu *statelessness* (ketidakwarganegaraan), dan isu hukum humanites internasional. Pertemuan yang dipimpin Nurhayati tersebut juga membahas mengenai kerjasama antara Komite IHL dengan *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

Pada hari yang sama, anggota delegasi DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri terpilih sebagai salah satu *Board Member of Forum of Young Parliamentarians*. Terpilihnya Irine sebagai anggota *Board Forum of Young Parliamentarians* menambah daftar anggota DPR RI yang menjadi anggota tetap Komite di IPU selain Nurhayati Ali Assegaf di Komite IHL, Evita Nursanty di Komite *UN Affairs* dan Rofi' Munawar di Komite *Middle East Questions*. ■

(mp.bksap), Foto: Dok.BKSAP



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah saat menerima Menteri Besar Selangor Malaysia Dato Seri Azmin Ali di ruang kerjanya

## Kerja Sama Negeri Serumpun Perlu Dikembangkan

Kerja sama negeri serumpun antara Indonesia dan Malaysia perlu terus dikembangkan untuk kemajuan dan stabilitas kedua negara. Kerja sama parlemen juga perlu diperkuat demi mengakrabkan dua lembaga dewan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah usai menerima Menteri Besar Selangor Malaysia Dato Seri Azmin Ali di ruang kerjanya, Senin (10/4). "Indonesia dan Malaysia adalah negara serantau, negara tetangga yang sangat dekat. Dan DPR RI yang memiliki fungsi diplomasi harus terus menjalin hubungan baik dengan Malaysia dari generasi ke generasi supaya ada persambungan perasaan bahwa kita adalah saudara. Apa yang sakit di Malaysia, sakit juga oleh kita. Apa yang gembira di Malaysia,

gembira juga di kita."

Banyak pertukaran pikiran yang disampaikan Fahri dalam pertemuan itu. Suasana akrab dan bersahabat sangat terlihat dalam pertemuan tersebut. Sementara Dato Seri sendiri dari Kerajaan Negeri Selangor dan delegasi Partai Keadilan Rakyat yang datang, ingin menyampaikan penghargaan kepada Fahri. Ia mengaku banyak mendapat pelajaran berharga dari dialognya dengan Fahri.

"Sudah tentu kita ingin melihat transformasi yang telah dijalankan untuk memastikan parlemen ini benar-benar utuh

dalam mengubah UU dan melihat bagaimana rakyat dan martabat negara itu dapat diangkat," komentar Dato usai pertemuan. Menurutnya, kestabilan kawasan sangat penting, agar kerja sama kedua negara tetap berjalan dengan lancar. Dato juga menambahkan, Selangor adalah salah satu negara bagian dari 14 negara bagian yang paling maju dan menyumbang paling besar bagi pemerintah Malaysia.

Ia berharap, kerja sama parlemen bisa dilakukan saat kedua parlemen merumuskan UU. Ada wacana pembentukan *standing committee* di tingkat parlemen, yang tugasnya meneliti rancangan UU dan membahasnya dengan para *stakeholder*. Tujuannya agar kedua negara mendapat rumusan yang tepat dalam membahas sebuah UU, terutama yang menyangkut kepentingan kedua negara. ■

(mh) foto: jayadi/hr.



# Komisi V DPR RI Dorong Bangun Jalur Puncak II Untuk Urai Kemacetan

Komisi V DPR RI mendorong pemerintah menjadikan Jalur Puncak II sebagai jalan nasional. Jalan tersebut akan menghubungkan Cianjur-Bogor-Jakarta yang diharapkan proses pembangunannya mulai dilaksanakan pada 2018 mendatang jika proses pembebasan lahan sudah selesai.

**D**alam kunjungannya ke Kabupaten Cianjur Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Ketuanya Fary Djemy Francis menuturkan, pada tahun 2012-2015 tidak ada intervensi dari Komisi V DPR RI dalam pembangunan Jalur Puncak II. Sedangkan pada tahun 2016 Komisi V DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan DPRD Kab. Cianjur dan juga telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian PUPR. Kamis (6/4)

"Kami sudah melakukan Raker dengan Kementerian PUPR untuk mendorong kembali pembangunan strategis Jalur Puncak II ini dan sudah direncanakan dan dialokasikan tahun anggaran 2019 dengan catatan tahun 2017-2018 persoalan menyangkut pembebasan lahan sudah diselesaikan. Tetapi jika proses pembebasan lahan untuk jalur puncak dua ini selesai pada tahun 2017 kami dorong di tahun 2018 sudah mulai," tutur Fary.

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Cianjur diterima Wakil Bupati Cianjur dan hadir pula Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Wabup Cianjur Herman Suherman mengapresiasi kunjungan Komisi V DPR RI ke Cianjur dalam rangka peninjauan Jalur Puncak II Ia berharap pembangunan jalur puncak dua segera dilaksanakan untuk mengurai kemacetan di Cianjur dan Bogor.

Anggota Tim Kunspek Djoni Rolindrawan mengharapkan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat harus bahu-membahu untuk merealisasikan Jalur Puncak II. Untuk pembangunan ini memerlukan dana 600 miliar lebih, supaya segera terlaksana pemerintah harus mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk itu proses pembebasan lahan harus segera diselesaikan.

Ikut serta dalam Kunspek ini, Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi, Sudjadi, Subarna, Djoni Rolindawan, Neng Eem Marhamzah Zulfa, Sahat Silaban, dan Fatmawati Rusdi. ■

(ft.mpi) foto: rtr/rtr



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi Fary Djemy Francis saat ke Cianjur

# Komisi V DPR RI Tinjau Perkembangan Proyek MRT

Komisi V DPR RI meninjau secara langsung perkembangan pelaksanaan pembangunan MRT di Bundaran HI, Jakarta Kamis (07/04). Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena bersama anggota tim langsung turun ke proyek pembangunan MRT tersebut yang berada di kedalaman 25 meter di bawah jalan MH Thamrin tersebut.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Michael Wattimena tinjau MRT di Bundaran HI

Pembangunan proyek yang mulai dari 2013 sampai dengan hari ini sudah sekitar 70%. Harapannya dengan capaian ini maka untuk ke depan yang tinggal satu tahun lebih ini bisa direalisasikan semua stasiun sesuai perencanaan dari selatan sampai dengan Utara

Dalam kunjungannya, Michael mengapresiasi rekan-rekan pekerja proyek MRT dimana capaian yang dihasilkan cukup signifikan. "Pembangunan proyek yang mulai dari 2013 sampai dengan hari ini sudah sekitar 70%. Harapannya dengan capaian ini maka untuk ke depan yang tinggal satu

tahun lebih ini bisa direalisasikan semua stasiun sesuai perencanaan dari selatan sampai dengan Utara" ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Dia juga berharap pada tahun 2019 bukan saja *finishing* terhadap program ini saja, tetapi sudah dioperasikannya MRT, sehingga ini bisa mengurai kemacetan yang akut di DKI Jakarta. Dalam wawancaranya dengan wartawan, dia berharap masyarakat Jakarta tidak lagi menggunakan mobil pribadi tetapi

sudah berorientasi kepada MRT.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Anggota Dewan dari Dapil Papua Barat itu juga mengharapkan, tahun depan kereta yang diimpor dari Jepang itu sudah ada dan disimulasikan. "Itu berarti dengan mudah teman-teman dari MRT dan Direktorat Perkeretaapian bisa mencoba atau mensimulasikan hasil dari proyek tersebut, sehingga pada saat penggunaan dan pengoperasiannya tidak menimbulkan masalah yang signifikan," ujar Michael.

Menurutnya, selama ini biasanya jarak tempuh dari Pasar Jumat sampai di Bundaran HI kalau menggunakan bis bisa makan waktu 1 sampai 2 jam. Dengan MRT bisa ditempuh dengan waktu 30 menit. "Ini adalah alternatif dan sebuah solusi yang bisa dijadikan sebagai sarana transportasi yang nyaman dan keamanannya terjamin bagi warga Jakarta," tutup Michael. ■

(en0.mpi) foto:en0/hr





# BURT DPR RI Jaring Aspirasi Masyarakat untuk Renstra 2019-2024

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menjaring aspirasi dari masyarakat guna penyusunan Rencana Strategis DPR RI untuk periode selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar sesaat setelah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan jajaran Civitas Akademika Universitas Sam Ratulangi, Universitas Klabat dan LSM setempat, acara ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, para pejabat eselon II dan III di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.



Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar (Kanan) bersama Agung Budi Santoso

“ Kita undang masyarakat, kita undang LSM, kita undang universitas perguruan tinggi, untuk menerima masukan, guna penyusunan Renstra ke depan di 2019 sampai 2024. Ternyata dari perjalanan kami ke berbagai daerah banyak masukan yang kami terima, dan kami sudah punya acuan, bahan untuk membuat Renstra yang baru di DPR RI,” papar Hasrul di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Jumat (07/4).

Dia menjelaskan Renstra yang akan dibuat sebagai pedoman untuk menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang moderen, bebas korupsi, terpercaya, kredibel dan mandiri. Hasrul menjelaskan untuk mencapai itu, penguatan tiga fungsi DPR RI perlu penyempurnaan.

“Untuk mencapai itu, perlu dilakukan berbagai upaya, terutama penguatan tiga fungsi DPR RI. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. DPR RI punya kewenangan sangat besar dalam penyusunan anggaran, mengubah dan menetapkan APBN,” ujar Hasrul.

Dia mengungkapkan masukan penting yang menjadi perhatiannya adalah, penilaian tolak ukur keberhasilan kinerja Anggota DPR RI. “Ini tantangan bagi kami Anggota DPR RI untuk meningkatkan kinerja,” ungkap Hasrul. ■

## BURT DPR RI Sosialisasikan dan Serap Aspirasi Masyarakat Sulut

Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan sosialisasi Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 ke Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (7/4). Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso yang memimpin rapat menyampaikan, selain sosialisasi Renstra juga menyerap aspirasi dari unsur masyarakat setempat.

“ Tujuan sosialisasi ini adalah menyebarluaskan Renstra selama lima tahun,” ungkap Agung dalam sambutannya di Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sosialisasi ini turut hadir Gubernur Sulut Olly Dondokambey, para pejabat eselon II dan III di lingkungan provinsi, serta jajaran civitas akademika Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Klabat.

Sosialisasi renstra ini guna meningkatkan peran dan fungsi DPR RI, sebagai pendukung kegiatan dewan, khususnya dalam melaksanakan perjalanan dinas. Kegiatan ini diperlukan untuk pemberian arahan proses teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.

Ini berdasar pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Selain itu diatur juga dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI. Didukung juga dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. ■

(eko,mp) foto: eko/hr



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bersama Gubernur Sulawesi Utara

# DPR RI Dorong Pembangunan Infrastruktur Guna Tingkatkan Perekonomian di Kaltim

Dua tahun terakhir ini perekonomian di Kalimantan Timur (Kaltim) cenderung negatif. Kontraksi ekonomi Kaltim terutama disebabkan oleh kinerja sektor utama yang mengalami penurunan akibat menurunnya permintaan batubara dari negara mitra dagang utama dan rendahnya harga komoditas internasional.

“Terkait hal tersebut, Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cak Asan bersama Bank Indonesia mengunjungi Kalimantan Timur dalam rangka untuk mengetahui perkembangan perekonomian di sana.

"Pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung menurun. Perkebunan dan pertambangan di Kaltim mengalami drop demand global harga batubara dan perkebunan turun. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung minus, pada 2015 menjadi -1,21% lalu membaik di 2016 menjadi -0,38%, namun di triwulan 2017 sudah membaik menjadi 0,8%," jelas Marwan Cak Asan di sela-sela pertemuan dengan Bank Indonesia cabang Balikpapan di Kantor Bank Indonesia Cabang Balikpapan,

Jumat (07/4)

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, bahwa saat ini industri tambang dan migas masih mendominasi sektor industri di Kaltim dengan pangsa sebesar 68%. Sedangkan industri non tambang migas hanya sekitar 32%. Ia berharap kedepannya peluang pengembangan industri non migas seperti karet, kimia serta makanan mempunyai potensi yang cukup besar.

"Kaltim tidak bisa lagi mengandalkan sektor batubara, harus ada inovasi atau terobosan supaya bisa menyusul pertumbuhan ekonomi yang berada di daerah-daerah lain agar pertumbuhan ekonomi tinggi sesuai target ekonomi nasional yaitu 5,1%," tegasnya.

Selain membuat inovasi baru demi meningkatkan perekonomian Kaltim, menurut Marwan, harus ada pembangunan

infrastruktur. Pembangunan yang harus dikembangkan ialah Tol Balikpapan - Samarinda dan pelabuhan yang harus didukung penuh dari pemerintah pusat.

"Kami minta kepada pemerintah daerah maupun Bank Indonesia segera menyampaikan analisa dan proposal sehingga kita ingin melihat seberapa jauh impact dari pembangunan infrastruktur tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kaltim ini," paparnya.

Ia juga berharap, dengan peningkatan program-program infrastruktur nasional dan terobosan atau inovasi baru yang sudah dicanangkan ini dapat menstimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Timur. ■

(ay/iso) Foto: Jayadi/hr



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cak Asan (Tengah kiri)

## Banyak Potensi Debitur KUR di Papua

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan, banyak potensi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua. Potensi itu ditemukan saat meninjau Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa di Jayapura, Papua, Jumat (7/4/2017). Menurutnya, potensi itu yang harus disambut positif oleh perbankan. Apalagi menurutnya, etos kerja masyarakat Papua cukup tinggi.



Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat meninjau Pasar Youtefa Jayapura

“ Saya bertemu pedagang di Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa Papua. Ada yang hanya menjual kangkung sehari-hari bisa dapat Rp 300 ribu sehari. Ada juga yang menjual ayam sampai raturan ekor setiap harinya. Itu sesuatu potensi untuk digarap (menjadi debitur KUR),” kata Indah, usai peninjauan.

Namun sangat disayangkan, tambah politisi F-PDI Perjuangan itu, potensi itu malah ditangkap oleh para rentenir atau bank-bank perkreditan yang menarik bunga tinggi. Tentu itu memberatkan masyarakat, khususnya para pedagang.

“Memang ada bank-bank yang tidak familiar. Tapi seandainya dibandingkan dengan KUR, pasti mereka (pedagang) akan mendapatkan untung lebih besar dan lebih sejahtera selama *visibility* usahanya bisa

terjamin. Perbankan kan bisa lihat,” jelas Indah.

Indah menilai, mungkin masih kurang masifnya edukasi maupun sosialisasi mengenai program KUR, sehingga masih banyak pedagang atau masyarakat yang belum menjadi debitur KUR.

“Untuk itu, saya tadi meminta BRI untuk mencatat pedagang-pedagang pasar yang potensi dibiayai dengan menggunakan skema KUR agar mereka bisa mendapatkan hasil lebih baik,” imbuh Indah.

Menurutnya, dengan pembiayaan KUR kepada usaha masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Masyarakat Papua, meningkatkan literasi keuangan di Papua, dan menekankan semakin tingginya tingkat kebutuhan

konsumtif. Untuk itu, ia meminta sosialisasi KUR harus ditingkatkan.

“Sosialisasi kurang masif. Buktinya banyak pedagang yang tidak tahu. Untuk itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus turun ke lapangan, banyak yang *tercover* KUR. Tapi KUR harus disalurkan dengan tepat, bukan hanya lomba-lomba menyerap plafon, terserap secara efektif dan produktif,” pesan politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Kunspek yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa (F-PDI Perjuangan) itu juga diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI DPR RI, diantaranya Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan), Tutik Kusuma Wardhani (F-PD), Junaidi Auly (F-PKS), Anarulita Muchtar (F-Nasdem), Amir Uskara (F-PPP), dan Nurhayati (F-PKB). ■

(sfr/mp) foto: sofyan/hr

# Keberhasilan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah Bergantung Pada Komitmen Kepala daerah

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU



Komitmen Kepala Daerah merupakan unsur utama dan terpenting dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 menunjukkan masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Maluku yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) selama lima tahun berturut-turut.

Terdapat perbedaan perolehan opini LKPD yang signifikan antara pemda yang benar-benar komitmen terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan yang tidak. Perolehan opini TMP selama lima tahun berturut-turut menunjukkan kurangnya komitmen dari daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya sehingga permasalahan tersebut terus berulang di tahun-tahun berikutnya. Terkait temuan berdampak finansial yang berlarut-larut dan tidak kunjung ditindaklanjuti perlu diberikan efek jera demikian disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ade Iwan Ruswana dalam diskusi dengan Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara di Kota Ambon, Provinsi Maluku (11/04).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK semester I Tahun 2016, terdapat 4 (empat) daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru. Pencapaian tersebut merupakan wujud komitmen dan kerja keras seluruh unsur baik Pemda, BPK maupun BPKP dalam mewujudkan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik. Lebih lanjut disampaikan oleh Ade, permasalahan-permasalahan terkait penerapan SAP berbasis akrual umumnya menyangkut penatausahaan dan pencatatan



Penyerahan plakat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

aset yang belum tertib sehingga mengakibatkan beban penyusutannya sulit dihitung, belum disiplinnya pencatatan dan penatausahaan dana hibah termasuk salah satunya dana BOS, belum validnya data piutang PBB-P2 sehingga penyisihan piutangnya tidak dapat diverifikasi, serta terkait ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam kesempatan tersebut, Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI mempertanyakan terkait perolehan opini TMP di Provinsi Maluku, "Bagaimana BPK mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi penyebab dikeluarkannya opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) selama lima tahun berturut-turut sejak TA 2011-2015 atas 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Maluku?" Ade menjelaskan bahwa penyebab perolehan



Penyerahan Plakat kepada Perwakilan BPK Provinsi Maluku

opini TMP berturut-turut yang paling utama adalah terkait komitmen Kepala Daerah. Selanjutnya terkait kebijakan mutasi yang belum sesuai dimana SDM yang sudah terlatih dan kompeten dimutasi tanpa adanya mekanisme *knowledge transfer* dan regenerasi. Selain itu, permasalahan juga muncul terkait kondisi geografis di kepulauan Maluku yang menyulitkan pemeriksaan dan SDM dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang kurang memadai.

Yono Andi Atmoko, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, ditemui secara terpisah menjelaskan bahwa terdapat kendala dari sisi BPKP antara lain terbatasnya anggaran dalam melaksanakan dukungan pembinaan terhadap SKPD, ketersediaan SDM dan waktu. "Namun kami tetap optimis dan harapan itu akan selalu ada bahwa pengelolaan keuangan Provinsi Maluku akan lebih baik ke depannya," Lanjut Yono. Tahun Anggaran 2015 Terdapat 9 dari 12 entitas yang menggunakan SIMDA di kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan sudah mencapai semua Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016 meski belum menyeluruh. Dari SIMDA keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA pendapatan dan SIMDA perencanaan, SIMDA BMD yang belum banyak digunakan jika dibanding SIMDA jenis lainnya padahal permasalahan terkait manajemen aset masih menjadi perhatian utama hampir diseluruh daerah. Terlepas dari segala permasalahan dan keterbatasan yang ada BPK dan BPKP terus berupaya mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Ambon sebagaimana diungkapkan oleh Asda bidang Administrasi Umum Pemkot Ambon, Romeo Soplanit bahwa penerapannya sudah berjalan dengan baik, dimana regulasi terkait kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur telah tersedia, sarana dan prasarana pendukung serta aplikasi SIMDA juga telah memadai meskipun terdapat keterbatasan SDM pengelola keuangan yang berlatar belakang akuntansi. Begitu juga jumlah auditor pada inspektorat kota belum ideal. ■

(Tim PKAKN / as)

## Komisi XI DPR RI Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Sulut

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengapresiasi pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Utara cukup baik meskipun masih adanya beberapa kendala yang di hadapi.

**M**enurut Melchias, kendala yang dihadapi itu ialah masih kurangnya satuan kerja (satker) di Badan Pusat Statistik (BPS) itu sendiri. "Masih ada 4 Kabupaten yang belum memiliki kantor perwakilan, padahal sangat penting karena kita sangat bergantung pada data-data BPS itu sendiri," ungkapnya.

Dari sisi bantuan pemerintah pusat, Melchias mengatakan, cukup besar memberi dana berjumlah Rp 8,7 triliun dan APBD lebih dari Rp 10 triliun. "Saya rasa ini perlu perhatian yang cukup baik dari pemerintah pusat terhadap Pemda Sulut, dan kita juga berharap dengan banyaknya anggaran yang di berikan kepada provinsi ini akan bisa menumbuhkan ekonomi dan menekan angka kemiskinan dan juga menekan pengangguran," ujar politikus F-Golkar daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I setelah pertemuan dengan BI, BPS, BAPPEDA Provinsi Sulut, Kemenkeu dan PT SMI di Gedung kanwil BI kota Manado. Politisi Golkar ini mencatat bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di Sulut lebih dari 150 persen *loan* nya lebih besar dari dana pihak ketiga. Kondisi ini beresiko terhadap likuiditas, karena itu diharapkan kepada BI dan OJK agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

"Jika terjadi likuiditas, akan menjadi problem terhadap bank yang cukup besar. Apa lagi komposisi pinjaman itu lebih kepada sektor konsumtif, ini harus dijaga agar tidak ada hal-hal yang membahayakan," tekan dia.

Di sisi lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Februari 2016 mencapai 7,82 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding Agustus



Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng

2015 sebesar 9,03 persen atau mengalami penurunan dibandingkan TPT Februari 2015 sebesar 8,69 persen. Dan Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 sebesar 5,50 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Sulut 6,40 persen. Tingkat pertumbuhan

ekonomi Sulut di atas nasional. "Banyaknya anggaran yang disalurkan untuk program-program pemerintah khususnya infrastruktur ini kan menyerap tenaga kerja. Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi mereka naik dan pengangguran menurun. Ini cukup baik dan harus diimbangi dengan kualitas pekerjaannya," pungkasnya. Pimpinan Komisi XI DPR RI ini berharap agar pemerintah pusat harus merencanakan *Cash Away* yang benar dari sisi penerimaannya. "Harus tepat, tidak bisa dibikin sesuatu yang tidak tentu. Karena itu membuat kontraktor tidak ingin berbisnis lagi dengan pemerintah. Siapa yang akan mengerjakan proyek jika tidak ada kontraktor," katanya mengingatkan. ■

(ezka.rmp) Foto: Azka/hr

## Panja RUU Pemajuan Kebudayaan Komisi X DPR RI Uji Publik di Pekanbaru

Tim kunker spesifik Panja RUU tentang Kebudayaan Komisi X DPR RI bersama Dirjen Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Riau serta Lembaga Adat Melayu (LAM) dan akademisi budaya melaksanakan pertemuan di Auditorium Lantai 8 Gedung Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Kamis, (6/4).

“Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan uji publik, meminta masukan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang yang kini lebih fokus mengenai pemajuan kebudayaan yang baik dan lebih mengena. Seperti, bagaimana tata kelola kebudayaan hingga mencapai misi memajukan kebudayaan tersebut, perlindungan karya-karya budaya hingga hingga

# Komisi VIII DPR RI Apresiasi Toleransi Beragama di Sumut

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap keberagaman dan toleransi di Sumatera Utara. Hal itu dikarenakan minimnya konflik antar umat beragama yang terjadi jika dibandingkan provinsi lain. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad pada kunjungan kerja spesifik ke Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara di Medan, Kamis, (06/04).

“Sumut salah satu daerah yang bagus dalam hal kerukunan umat antar beragama. Saya apresiasi, bahwa di sini tidak pernah ditemukan gesekan antar umat beragama,” ujar Noor saat pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Tohar Bayuaging. demikian, hal ini patut untuk dijaga baik agar kerukunan antar umat beragama dapat terus dilanjutkan di masa mendatang. Meski begitu, Noor Achmad juga menyoroti persoalan tentang bagaimana agama mampu menjadi alat bagi modernitas ke depan. “Ada persoalan yang dihadapi sekarang, apakah agama bisa dijadikan alat modernitas ke depan,” tutur Noor Achmad.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad pimpin Kunspek ke Kanwil Kemenag Sumatera Utara

Terkait kerukunan antar umat beragama, Politisi Golkar ini menjelaskan pihaknya cukup konsen dalam memperhatikan perkembangan

pembinaan agama melalui lembaga keagamaan. “Kami konsen memperhatikan bagaimana perkembangan pembinaan keagamaan melalui lembaga keagamaan di masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan persoalan terkait kerukunan antar umat beragama untuk selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja dengan pemerintah pusat. “Apa yang akan disampaikan bapak-ibu akan kami bawa dalam rapat kerja dengan pemerintah pusat,” tuturnya.

Noor Achmad pun juga berpesan agar seluruh lapisan masyarakat dapat terus menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu dari berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. “Dengan Pancasila kita saudara,” tegas Noor Achmad kemudian diiringi tepuk tangan para hadirin.

Diharapkan pasca kunjungan Komisi VIII DPR RI ini akan semakin memperkuat semangat kebersamaan dan persaudaraan antar masyarakat di Sumatera Utara ditengah maraknya perbedaan di masyarakat. Oleh karena itu pendidikan Pancasila

sebagai alat pemersatu harus dapat ditularkan secara baik bagi generasi sekarang ataupun generasi mendatang. ■

(hs.mp) foto: hendra/hr



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

upaya peningkatan kesejahteraan pelaku kebudayaan itu sendiri.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang juga Ketua Tim Kunker Panja RUU Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bahwa

budaya akan dibatasi menjadi terkekang. “Budaya itu bebas tapi harus ada ikatan. Dimana budaya untuk mempersatukan bangsa, karena sudah mulai terkikis oleh perkembangan globalisasi. Bagaimana budaya bisa menyejahterakan masyarakat, jangan budaya jadi beban tapi jadikan investasi. Sebab tak hanya migas, pemerintah mendorong sektor pariwisata dan kontennya, baik UKM dan budaya,” ujar Fikri.

Dijelaskan pula, adanya peraturan ini menjadi payung hukum, advokasi pada pemajuan budaya dan kehidupan berbudaya di masa yang akan datang. Hal ini ditekankan

oleh Al Azhar selaku Ketua LAM Riau yang mengatakan, harus ada landasan untuk memajukan kebudayaan. Salah satunya yakni kejelasan peraturan yang diberlakukan.

Hal itu senada dengan marwah yang telah berkembang dalam perancangan RUU ini. Kata Fikri, saat ini aturan kebudayaan setiap daerah sudah tersusun, hanya saja perlu perlindungan pelestarian dan advokasi yang jelas diterapkan dalam sendi-sendi kebudayaan.

Menurutnya, konsultasi publik tentang RUU Pemajuan Kebudayaan di Pekanbaru ini adalah bagian dari tahapan akhir, proses pada Tim perumus dan sinkronisasi untuk kemudian dibawa ke sidang Panja. ■

(ray.mp) foto: ray/hr

# Komisi IX DPR RI Harapkan PTSP Indramayu Harus Lebih Baik

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Suir Syam (F-G) melakukan kunjungan ke Kabupaten Indramayu dalam rangka meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif), Indramayu, Jawa Barat, Jumat, (7/04).



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Suir Syam

“Komisi IX DPR RI memilih Kabupaten Indramayu ini karena Indramayu pemasok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar nomor dua di Jawa Barat,” kata Syam.

Di Indramayu ini juga telah dibentuk Desmigratif, “Di sini sudah ada Desmigratif dan sudah dibuat PTSP yang diperuntukkan untuk kemudahan masyarakat menjadi TKI,” ungkap Politisi asal Gerindra ini.

Lebih lanjut Syam menjelaskan, TKI yang akan berangkat ke luar negeri harus dipermudah, “Kita harus menyiapkan TKI mulai dari persiapan, pemberangkatan dan penempatan TKI nanti di luar negeri agar tidak ada calo yang masuk dalam hal ini,” jelasnya.

la menambahkan, TKI yang sudah pulang, seharusnya hasil yang didapatkan di sana

bisa digunakan untuk membuat usaha di sini, “TKI yang telah kembali seharusnya bisa membuat usaha dan di sini mereka punya keterampilan serta punya modal sehingga tidak perlu keluar negeri kembali, jadi cukup satu kali saja,” tambahnya.

“Harapannya kita ke sini supaya bisa mendukung semua permasalahan TKI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada calo lagi,” tambahnya.

Syam menjelaskan, pihaknya juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait dan sedang dirumuskan untuk Undang-Undang Perlindungan dan Tenaga Kerja di luar negeri dan melihat bagaimana pelaksanaan di sini. Jika ini bagus, lanjut dia, kenapa tidak

dicontoh secara nasional.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Indramayu Anna Sophana menerangkan bahwa di sini masih ada instansi yang belum siap, “Ya, benar masih ada kendala dalam PTSP ini, karena belum semua instansi mendukung sistem ini seperti pembuatan Surat Keterangan Berbadan Sehat di Kementerian Kesehatan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polda Jawa Barat.

“Kita mendapatkan data di lapangan bahwa PTSP ini belum sempurna karena dari pemerintah sendiri belum mendukung program ini dengan baik dan ada beberapa instansi yang berat untuk melaksanakan PTSP ini,” tutup Syam. ■

(ef/sco)/foto/hresno/hr





# Pendidikan Keterampilan di Panti Asuhan Harus Bersinergi dengan Perusahaan

Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menilai pendidikan keterampilan yang dilakukan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), dan Panti Sosial Bina Remaja Runggu Wicara (PSBRW) Kupang NTT, keterampilan di bidang otomotif, jahit, musik, dan keterampilan lainnya tidak hanya sampai di situ saja.

“Pemda setempat yang membina remaja panti sosial harus bisa bersinergi dengan pihak-pihak lainnya seperti perusahaan-perusahaan besar maupun kecil yang bisa menyalurkan bakat dan keahlian mereka.

"Sehingga anak-anak dan remaja di panti sosial bisa mengangkat martabat dirinya sendiri, menjadi manusia yang produktif terhadap ekonomi, dan bukan jadi beban pemerintah atau negara," demikian diungkapkan Itet saat melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, Kepala PSBRW Efata Kupang Dardi, Kepala Dinas Sosial Welem Foni, Kepala PSBR Kupang.

Geraldo Apat dan Siswa-Siswi binaan panti sosial di Panti Sosial Bina Remaja

(PSBR) Effata. Kupang, NTT, Kamis (06/4).

Lebih lanjut politisi PDIP ini mengharapkan, pemerintah bisa membantu mengembangkan bakat kreatif para remaja binaan panti sosial dengan cara membebaskan biaya sekolah kejuruan.

"Dengan mereka bersekolah kejuruan dengan bakat yang mereka punyai bisa lebih dimaksimalkan lagi, bisa menghasilkan seni kreatifitas yang lebih baik saat mereka lulus nanti," harapnya. Adapun jumlah keseluruhan yang menerima manfaat tahun 2016 yang sudah terlayani kebutuhan sebanyak 449 orang.

Tim kusek Komisi VIII DPR RI meninjau langsung kegiatan para remaja di panti sosial sambil berbincang menyerap aspirasi. PSBR Naibonat Kupang mempunyai visi dan misi,

mewujudkan citra dan kreatifitas berkarya bagi remaja menuju kemandirian dan kesetaraan.

Sedangkan misinya, menciptakan lingkungan panti yang asri, aman, sehat, ramah, indah dan religius, meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial remaja putus sekolah terlantar. Selain itu, meningkatkan profesionalisme, etos kerja dan moral pelayanan yang mengakar pada profesi pekerjaan sosial.

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI terdiri, Ketua tim Sodik Mudjahid (F-Gerindra), anggota Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDI-P) Deding Ishak (FPG) Khatibul Umam Wiranu(FPD) Kuswiyanto(F-PAN) dan Achmad Mustaqim (FPP). ■

(rumi,mp) foto: rumi/hr



## Komisi IX DPR RI Pastikan Program Desmigratif Wonosobo Berjalan Sesuai Rencana

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay, meninjau pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, guna memastikan mekanisme dan implementasi program Desmigratif tersebut berjalan sesuai rencana pemerintah.

“ Tujuan kita kesini adalah untuk memastikan bahwa memang program ini dilaksanakan dengan benar sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Kita juga akan menggali informasi yang terkait dengan ini, sekaligus bertatap muka dengan para mantan buruh migran tersebut. Dengan begitu kita bisa memperoleh pandangan dan referensi bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup para mantan buruh migran ini,” papar Saleh, Jum'at (07/04).

Ia mengatakan, Komisi IX DPR RI ingin mendengar secara langsung berbagai pengalaman yang dirasakan oleh para buruh migran itu, sekaligus mendengarkan saran-saran yang ingin disampaikan agar bisa dilakukan perbaikan.

"Komisi IX DPR RI sedang merevisi dan memperbaiki Undang-Undang tentang Penempatan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, oleh karenanya kita harapkan masukan dari mereka dan bisa menjadi bahan

karena mereka sendiri yang sudah mengalami. Selain itu ingin melihat peran serta Pemda dalam melakukan pembinaan mantan buruh migran. Pemda harus ikut berpartisipasi aktif, supaya hal ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat saja," ucapnya.

Politisi PAN ini berharap ada satu koordinasi lintas Kementerian itu, dengan harapan para buruh migran tersebut bisa menjadi maju setelah pulang ke tanah air, dan tidak kembali bekerja ke luar negeri. "Kita harapkan mereka bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru disini, bukan hanya untuk mereka dan keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Ada nilai tambah yang mereka buat untuk bangsa ini dengan terciptanya lapangan kerja baru tersebut di daerah, dan dengan modal yang mereka bawa dari luar negeri," tegas Saleh.

Komisi IX DPR RI berharap Ini masih tahap awal dari rancangan program bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Menurutnya,



Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani

bila program ini berjalan dengan benar, Komisi IX DPR RI ingin pemerintah memberikan perhatian khusus, misalnya mengenai pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja yang difasilitasi dengan benar.

"Kita akan pertanyakan kepada pemerintah tentang *road map* nya, kalau berhasil maka harus dicontoh oleh daerah lain. Kalau di Wonosobo sendiri sudah lumayan bagus, karena sudah terlihat hasil kreatifitasnya, tetapi untuk memastikan program ini berjalan secara benar secara lintas Kementerian dan Lembaga, tentu Komisi IX DPR RI akan mendalaminya lagi," pungkasnya. ■

(dep.mip) Foto Anne/hr

## Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Unja Bahas Peningkatan Mutu Pendidikan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menerima sejumlah mahasiswa dari Universitas Jambi (Unja), di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (10/04). Audiensi itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menyerap aspirasi dari mahasiswa dan dosen.

Sutan yang juga merupakan alumni Unja mengatakan, dalam audiensi itu terpapar beberapa permasalahan. Mulai dari masalah peningkatan akreditasi, masalah dosen yang belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), masalah beasiswa serta sarana prasarana yang belum memadai.



"Mereka datang kesini untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait bagaimana Unja ke depan. Khususnya masalah akreditasi, selain itu mereka juga mengharapkan Unja bisa menjadi salah satu Universitas Badan Layanan Umum (BLU) agar bisa melakukan kerjasama dalam memajukan Unja," kata Sutan.

Politisi partai Gerindra itu mengatakan, terkait permasalahan peningkatan akreditasi, Komisi X DPR RI akan mendorong

Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemenristekDikti) untuk merealisasikan peningkatan akreditasi baik program studi, pendidikan maupun fisiknya.

Mengenai kepastian status dosen yang belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Komisi X DPR RI akan mendorong KemenristekDikti untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Menpan RB.

"Akreditasi itu penting untuk Unja

ke depan, ini akan kita bahas saat raker dengan KemenristekDikti untuk segera direalisasikan. Sedang mengenai permasalahan dosen yang belum mendapat NIDN dan merasa pengabdian belum mendapat respon baik dari pemerintah juga akan menjadi bahan kita saat raker," ujarnya. Pasalnya politisi dapil Jambi ini berharap ke depan Unja bisa setara dengan Universitas ternama lainnya di Pulau Jawa. ■

(ria,mp) - foto Kresno/hr

## Komisi I DPR RI Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewas TVRI

Komisi I DPR RI menggelar serangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) Televisi Republik Indonesia (TVRI) hari ini, Senin, (10/4). Hal ini dilakukan guna menggali visi dan misi kesebelas calon Dewas TVRI untuk selanjutnya dipilih sebanyak 5 orang untuk kemudian dapat disahkan oleh Presiden.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarsyah Fikarno menuturkan tugas dan peran TVRI kedepan semakin berat, oleh karenanya dibutuhkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang TVRI secara umum. Politisi Golkar itu juga meminta kepada para calon untuk dapat memahami dua RUU yang sedang dibahas di DPR RI yang berkaitan dengan TVRI yakni RUU Penyiaran dan RUU RTRI.



Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarsyah Fikarno

"Ada dua UU yang berkaitan dengan keberlangsungan TVRI. Yakni RUU Penyiaran dan RUU RTRI. RUU Penyiaran yang akan jadi payung transformasi analog ke digital dan RUU RTRI dimana TVRI dan RRI akan digabung, ada banyak penolakan dan penerimaan," ujar Dave.

la pun meminta kepada seluruh calon untuk dapat memahami kedua RUU tersebut. "Banyak yang khawatir jika TVRI dan RRI digabung akan mematikan mata pencaharian banyak pegawai TVRI. Tapi banyak yang sangat *welcome* dengan kehadiran RUU ini karena ini menjadi kesempatan untuk konsolidasi dan

revitalisasi kedua lembaga penyiaran tersebut," tegas Dave

"Lalu saya ingin tahu bagaimana para calon Dewas TVRI ini memahami kedua RUU tersebut," tanya Dave saat menguji pemahaman para calon Dewas tersebut.

Adapun sebelas nama calon Dewas LPP TVRI yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI adalah Adam Bachtiar (Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI), Antar MT Sianturi (PNS BPKP), Arief Hidayat Thamrin (Karyawan swasta), Dudi Hendrakusuma Syahlani (Dosen), Eddy Kurnia (Tenaga Profesional di Perum Peruri).

Selain itu juga ada Edi Winarto (Praktisi



media massa), Made Ayu Dwie Mahenny (PNS TVRI), Maryuni Kabul Budiono (Dosen), Pamungkas Trishadiatmoko (swasta), Supra Wimbarti (Dekan Fakultas Psikologi UGM) dan Yazirwan Uyun (Direktur Utama PT. ANPA Internasional). ■

(ns/sc) Foto: Jayadi/hr

## Keterlibatan Parlemen dalam Kerjasama Internasional Keniscayaan Zaman

Tantangan global telah menarik parlemen untuk aktif berpartisipasi dalam kancah hubungan internasional, kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha dalam sambutannya saat pertemuan dengan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Ruang Supardi, Senin (10/04).

Dilihat dari perspektif sejarah, kata Syaifullah, ide tentang diplomasi parlemen sebetulnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Dalam perspektif historis, lanjutnya, fungsi ini telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi baik dalam format kekaisaran maupun republik. Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa, diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974-1975.

Oleh karenanya, sambung Syaifullah, peran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif.

Secara faktual, menurut politisi Fraksi PPP, keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha berfoto bersama

keniscayaan zaman. Meski dalam berbagai literatur disebutkan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI bersifat *second track* (diplomasi jalur kedua), diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi tradisional yang dijalankan pemerintah.

Politisi PPP ini menggarisbawahi bahwa pada praktik di lapangan DPR RI tidak hanya menjalankan diplomasi *parliament to parliament*. "DPR RI juga membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah

(NGO) dari mancanegara," pungkasnya.

Lebih jauh, Syaifullah mengatakan bahwa diplomasi parlemen adalah amanat UU MD3. Karena sudah termaktub dalam UU, DPR RI sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk melakukan diplomasi harus siaga menjalankan peran tersebut dengan berpedoman pada prinsip

politik luar negeri (Polugri) Republik Indonesia yang bebas aktif guna pencapaian kepentingan nasional Indonesia, yang merupakan penjabaran dari apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

"Ke depan kita harus memikirkan bersama implementasi diplomasi total yang melibatkan semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali civitas akademika dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk turut menjaga kepentingan nasional Indonesia," tutupnya. ■

(i.w.m.p) Foto: Iwan/hr

## Perlu Manajemen Air Nasional Atasi Banjir dan Kekeringan

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjadi momentum yang telah lama dinantikan guna membahas penanganan banjir di kawasan produksi pangan.

## Komisi III DPR RI Minta Menkumham Himbau Presiden Kunyur ke Lapas dan Rutan

Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang minta Menteri Hukum dan HAM untuk menghimbau Presiden untuk kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham dan jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

“ Tolong pak Menteri menghimbau Presiden untuk kunjungan kerja ke lapas dan rutan. Jangan hanya ke pasar dan mall lah. Biar hatinya hidup. Menyedihkan dan mengharukan sekali kondisi warga binaan di lapas,” ujar Junimart dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo.

Pada kesempatan itu Junimart menyoroti kondisi lapas dan rutan yang seperti pemaparan Menkumham terjadi *over capacity* atau kelebihan kapasitas penghuni. *Over capacity* tersebut memang kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan dalam Lapas dan rutan.

Dalam hal ini Junimart juga berharap Menkumham membangun komunikasi dan koordinasi dengan lembaga terkait. Pasalnya jika terjadi insiden di lapas atau rutan, pasti hal itu menjadi tanggung jawab Menkumham, bukan instansi lain.

Dalam beberapa kali kunjungan kerjanya, Komisi III DPR RI seringkali menerima masukan dari warga binaan bahwa mereka merupakan korban dan penzhaliman polisi. Misalnya, warga



Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang

binaan yang mengaku tidak menggunakan narkoba, namun korban dari "jebakan" polisi. Hal ini kemudian membuat warga binaan seolah-olah ingin menerkam ketika melihat

polisi. Kondisi ini harus diperbaiki, Menkumham harus terus membangun komunikasi dan kordinasi dengan pihak atau instansi terkait. ■

(ayu/sc) Foto : Anief/hr

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap dengan adanya pertemuan lintas Kementerian tersebut dapat mewujudkan suatu manajemen air nasional yang baik di Indonesia.

"Ini momentum yang telah kita tunggu, kami berharap tidak hanya mengatasi banjir dan kekeringan, tetapi dengan pertemuan lintas Kementerian ini diharapkan Indonesia dapat mewujudkan suatu manajemen air nasional yang baik. Sebab tanpa ada manajemen air nasional yang baik, maka banjir dan kekeringan akan terus berulang," ucap Daniel di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/04).

Seharusnya sebagai negara tropis, Indonesia menjadi negara yang subur dan penuh berkah. Namun kenyataan yang terjadi

justru sebaliknya, kalau hujan terjadi banjir dan kalau tidak hujan kekeringan bahkan kebakaran.

"Hal itu karena tidak ada manajemen air nasional yang baik, sehingga malah memberikan musibah kepada rakyat. Selain keberadaan gugus tugas itu berkoordinasi mengatasi banjir dan kekeringan yang ada, Komisi IV DPR RI bersama gugus tugas lintas Kementerian ini bisa menghasilkan suatu master plan manajemen air nasional yang baik, yang bisa membawa berkah bagi pertanian dan pangan. Kalau manajemen air nasional yang baik sudah terwujud, tantangan negara tropis menjadi tinggal satu yakni masalah hama," ujarnya. ■



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

(dep.mp) Foto : Andri/hr

# Dewan Nilai Persiapan Desmigratif Belum Optimal

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menilai persiapan pemerintah terkait pembentukan desa migran produktif (Desmigratif) belum optimal. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau Desa Camplong, Fatuleu, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (07/04).

“Pemerintah ingin menyediakan berbagai infrastruktur sebagai dukungan kepada desa kantong TKI agar mereka betah dan tidak perlu keluar negeri. Sayangnya, mereka belum dapat arahan yang komprehensif dari pemerintah,” ungkap politisi dari F-Golkar ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan konsep Desmigratif sangat baik untuk masyarakat yang tinggal di daerah kantong TKI. Melalui program ini calon TKI akan diberikan pendampingan dan pelatihan, hingga memberikan peluang kerja bagi

yang purna TKI agar mereka tidak perlu lagi menjadi buruh kasar di negeri lain.

Ia pun mendukung program Desmigratif untuk segera dijalankan sehingga masyarakat mengurungkan niatnya untuk bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran. Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan dari warga setempat, mereka belum mendapatkan arahan yang komprehensif dari pemerintah.

"Anggarannya kita dukung, tapi jangan sampai program baik, konsepnya baik, namun pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri

dengan baik," jelasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, ia mengatakan rencana pembentukan desa migran belum dipersiapkan secara matang. Hal ini terlihat dari tidak adanya Juklak dan Juknis terkait pembentukan Desmigratif yang belum diterima oleh kepala Desa Camplong.

"Padaha bulan Juni itu dicanangkan harusnya sekarang sudah dipersiapkan, namun saya belum lihat infrastrukturnya," terang Okky.

Di sisi lain, ia menghimbau agar pelaksanaan program Desmigratif melibatkan lintas sektoral. Salah satunya adalah, Kementerian Informasi dan Informatika dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menangani anak-anak TKI atau buruh migran dalam bentuk *community parenting*.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan 120 desa yang akan menjadi Desmigratif di 50 Kabupaten/Kota pada 2017. Khusus untuk provinsi

Nusa Tenggara Timur, akan dibentuk 20 Desmigratif dari kabupaten/kota kantong TKI.

Ada empat kegiatan utama yang diusung dalam program Desmigratif. Pertama, memberikan pusat layanan migrasi di balai desa. Kedua, membentuk kegiatan usaha produktif bagi pasangan TKI yang bekerja diluar negeri agar memiliki keterampilan. Ketiga, *Community Parenting* sebagai bentuk pendampingan terhadap anak TKI. Keempat, penguatan usaha produktif dalam bentuk koperasi usaha. ■

(ann, sc) Foto : Anne/hr

## Civitas Akademika dan Pemkot Butuh Informasi Keparlemenan

Informasi tentang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI sangat diperlukan bagi kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), demikian disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UMSU, Prof. DR. Muhammad Arifin Gultom SH., M.Hum, saat berdiskusi dengan Tim Penerbitan, Biro Pemberitaan Parlemen yang melakukan kegiatan evaluasi distribusi Buletin dan Majalah Parlemen di Prov. Sumatera Utara (11-13/4).

"Penting sekali bagi kami di lingkungan Civitas Akademika mengetahui kegiatan-kegiatan Dewan, karena hal tersebut tentunya dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa dan bagi kami sebagai pengajar," urai Arifin. UMSU berharap agar mendapat tambahan distribusi Majalah dan Buletin Parlemenaria," kalau sebelumnya kami hanya mendapatkan masing-masing 1 eksemplar Majalah dan Buletin Parlemenaria, maka dengan kedatangan Tim Penerbitan kami berharap mendapat tambahan minimal 10 (Sepuluh) eksemplar," Tambah Arifin.

Hal senada diungkapkan pula oleh Kabag Humas Pemerintah Kota Medan, Ridho Nasution, S.STP. "Sewaktu saya menjadi Camat, saya mengetahui betul Majalah dan Buletin Parlemenaria ini sampai dan diterima di wilayah saya bahkan sampai di Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah saya. Begitu penting informasi yang ada di dalam Majalah dan Buletin Parlemenaria, kami dapat mengetahui segala kebijakan-kebijakan yang ada di Dewan, melalui Majalah dan Buletin Parlemenaria inilah, kami pun mengetahui adanya kegiatan-kegiatan



Penyerahan cenderamata dari Biro Pemberitaan Parlemen / Bagian Penerbitan kepada PT POS Regional I Sumut, Humas Pemkot Medan serta Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dewan saat Kunker di wilayah Pemkot Medan," Tandas Ridho.

Selanjutnya Ridho berharap dapat diberikan kesempatan agar Pemkot dapat mengirimkan tulisan-tulisan. "Kalau diperbolehkan mungkin kami bisa diberikan kesempatan untuk menulis pada Majalah dan Buletin Parlemenaria, setidaknya jika Pak Walikota ingin menyumbangkan tulisan ada tempat atau kolom untuk hal tersebut," Pinta Ridho.

Menjawab hal tersebut, Kabag Penerbitan Setjen dan BKD DPR RI, Djustiawan Widjaya mengatakan, melalui Rubrik Sumbang saran siapapun dapat mengirimkan tulisan. "Silahkan kirimkan tulisan kepada Redaksi, tentunya nanti

Redaksi lah yang akan menentukan layak atau tidaknya sebuah tulisan dapat dimuat."

Dalam kesempatan lain, terkait Pendistribusian Majalah dan Buletin Parlemenaria untuk Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Pos Medan, Khairil Anwar. Yang dikunjungi secara terpisah mengatakan, "Sejauh ini tidak ada kendala dan hambatan apapun dalam proses pendistribusian Majalah dan Buletin Dewan, Kami senang bisa bekerja sama dan melaksanakan pekerjaan ini dengan cepat dan tepat," Ujarnya dengan ramah. ■

(TIM PENERBITAN/DUS)



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Anggota DPR RI dan Menteri ESDM membuka acara 1st Indonesia Energy Conference di Hotel Mulia, Selasa (11/4). Foto : Jaka

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan Anggota Parlemen Republik Korea di Ruang Kerjanya, Selasa (11/4). Foto: Andri



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah menebar benih ikan nila di Waduk Gajah Mungkur dalam rangkaian acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (8/4). Foto: Naefuroji



Sekjen DPR RI Achmad Djuned dan Kepala BKD DPR RI Johnson Rajagukguk menanam bibit pohon tanjung di area Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (8/4). Foto: Naefuroji